



(LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2024

SEKRETARIAT DAERAH



BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Sekretariat daerah Kabupaten Berau ini disusun. Agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

Tanjung Redeb, Maret 2025



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Berau Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani

a. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Kategori Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B (65) terealisasi B (73,61) atau belum mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113 persen.

b. Indikator Nilai/Predikat AKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Berau target B (68) terealisasi C (62,74) atau belum mencapai target dengan tingkat capain kinerja sebesar 92 persen.

c. Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat target 94,06 terealisasi (A) 85 atau sudah

mencapai target. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90 persen

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah

- a. Indikator predikat/status LPPD di tingkat provinsi (kategori kabupaten) Kabupaten Berau dengan target Status/Predikat Tinggi dan terealisasi Sedang* dengan nilai 93,74 persen.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum

- a. Indikator Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan dengan target 100 persen dan terealisasi 91,67 persen atau mencapai melebihi target 91,67 persen

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)

- a. Indikator Indeks proses Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan target 81 persen terrealisasi 76,14 persen atau melebihi target. Dengan capaian kinerja 94 persen

5. Sasaran Lima : Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD

- a. Indikator Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD dengan target 100 persen terealisasi 100 persen atau mencapai target.

Dengan demikian, dari hasil perolehan penilaian capaian kinerja tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 rata-rata capaian kinerja 90 persen. Ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target namun masih dalam kategori baik, hal ini menjadi bahan evaluasi dan akan di perbaiki di tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I	Pendahuluan 1
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Gambaran Sekretariat Daerah..... 1
C.	Susunan Organisasi..... 2
D.	Keragaman SDM 5
E.	Aspek Strategis Organisasi..... 7
F.	Isu Strategis..... 7
G.	Sarana dan Prasarana..... 8
Bab II	Perencanaan Kinerja 11
A.	Rencana Strategis 11
1.	Visi dan Misi 11
2.	Tujuan dan Sasaran 12
3.	Kebijakan, Strategi dan Program 13
B.	Indikator Kinerja Utama 16
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024..... 17
Bab III	Akuntabilitas Kinerja..... 24
A.	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP 24
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau 24
2.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... 24
B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 27
C.	Analisis Capaian Kinerja 28
D.	Realisasi Anggaran..... 57
Bab IV	Penutup..... 64
 LAMPIRAN :	
	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024..... 68
	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 70
	Perjanjian Kinerja Utama..... 75
	Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2024..... 77

Daftar Tabel

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis kelamin dan pendidikan.....	11
Tabel I.2	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	14
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel II.2	Program/Kegiatan Tujuan dan Sasaran	21
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	23
Tabel II.5	Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2024	24
Tabel II.6	Anggaran Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	27
Tabel III.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.....	28
Tabel III.2	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Triwulan	30
Tabel III.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	33
Tabel III.4	Sasaran I Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani.....	34
Tabel III.5	Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	35
Tabel III.6	Indikator Kinerja Kategori Nilai/Predikat AKIP	37
Tabel III.7	Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat.....	39
Tabel III.8	Sasaran II Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah	44
Tabel III.9	Sasaran III Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum.....	48
Tabel III.10	Sasaran IV Meningkatnya Pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya..... (value for money)	51
Tabel III.11	Sasaran V Meningkatnya Realisasi APBD	55
Tabel III.12	Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2024	58
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	58
Tabel III.11	Alokasi Anggaran Belanja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	62
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	63

Daftar Gambar



Gambar I.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2024	10
Gambar I.2	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar I.3	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan	12

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Gambaran Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibentuklah Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

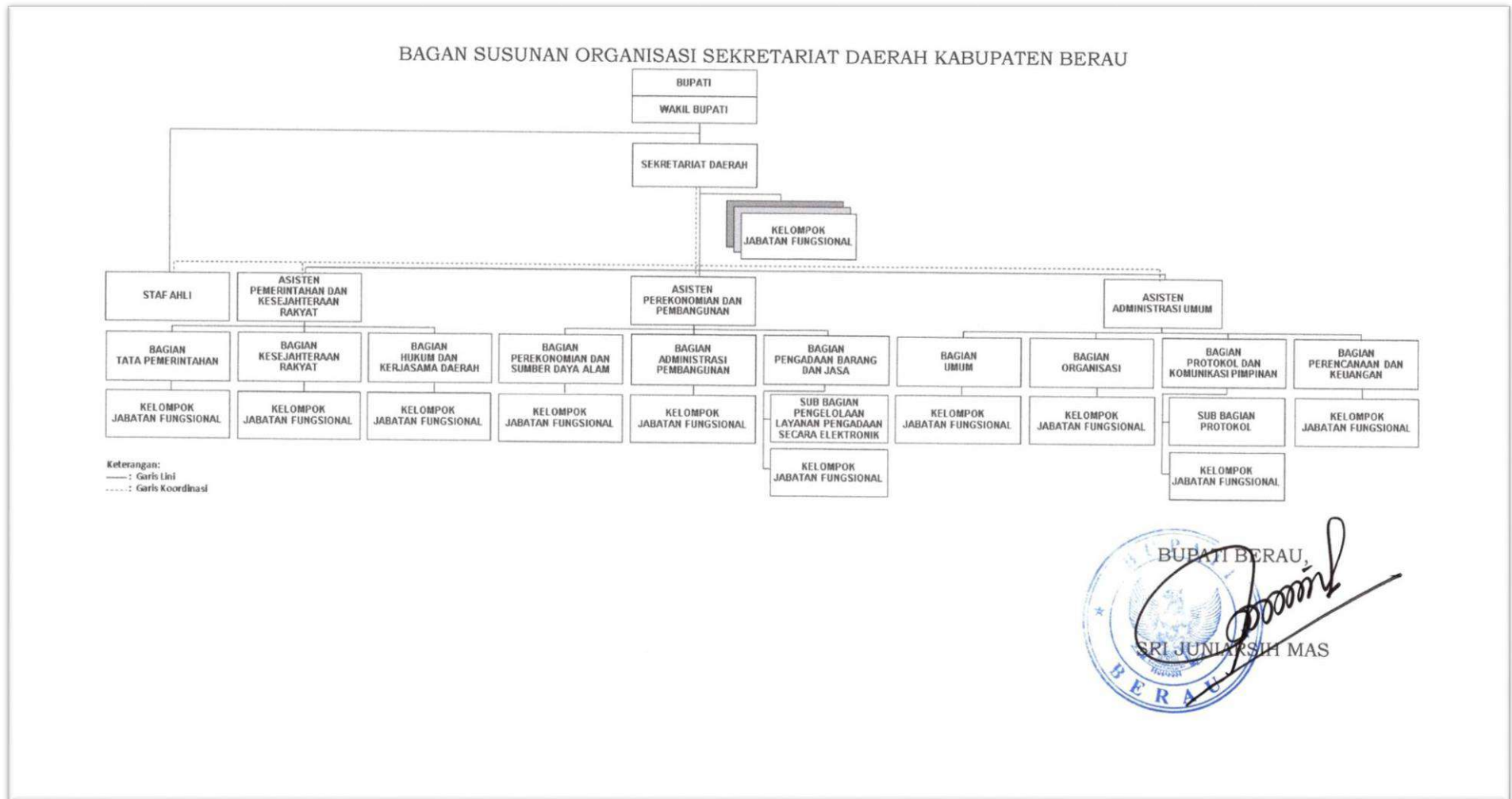
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 48 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Asisten dan Pembangunan dan Perekonomian membawahkan :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

- b. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan ;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2024



D. KERAGAMAN SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 148 orang, yang terdiri dari 98 orang laki-laki (59,75%) dan 50 orang perempuan (40,25%).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan SD sebanyak 2 orang, SLTP 3 orang, SMA sebanyak 43 orang, dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 68 orang, dan S2 sebesar 22 orang.

Tabel I.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

NO	URAIAN	JENIS		PENDIDIKAN								
		KELAMIN		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
		L	P									
1	SEKRETARIS DAERAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	ASISTEN I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	ASISTEN II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	ASISTEN III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Bag. Tata Pemerintahan	11	3	-	-	4	-	-	-	-	9	1
9	Bag. Hukum dan Perundang-Undangan	10	7	-	-	4	-	-	-	-	10	3
10	Bag. Kesejahteraan Rakyat	11	6	-	-	8	-	-	1	-	7	1
11	Administrasi Pembangunan	5	6	-	-	1	-	-	-	-	8	2
12	Peerekonomian dan SDA	4	2	-	-	2	-	-	-	-	4	-
13	Bagian Pengadaan Barang dan	15	7			5					9	8

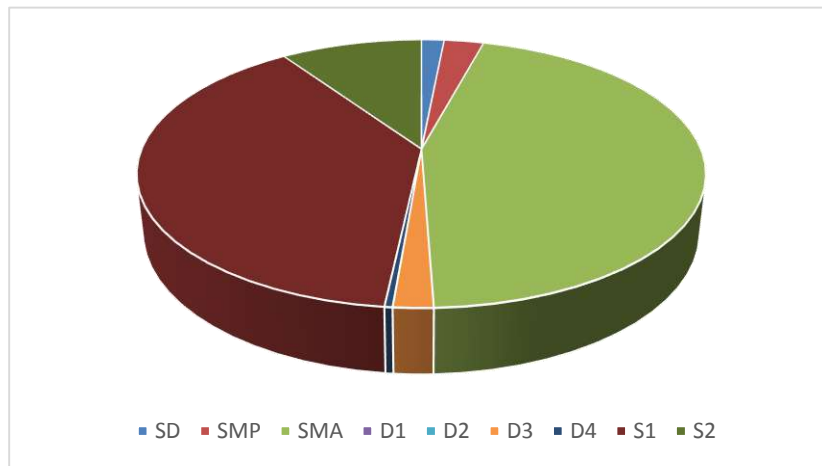
	Jasa											
14	Bagian Protokol dan Kamunikasi Pimpinan	15	10	-	-	11	-	-	1	-	11	2
15	Bag. Organisasi	11	5	-	-	5	-	-	-	1	8	2
16	Bagian Perencanaan dan Keuangan	14	9	-	-	7	-	-	3	-	11	2
17	Bag. Umum	67	36	4	7	71	-	-	-	-	20	1
	JUMLAH	169	92	4	7	118	0	0	5	1	101	25

Sumber data : Bagian Umum, 2024

Gambar I.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar I.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan



E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau mempunyai peran strategis meliputi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sehingga baik buruknya kualitas perumusan dan kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Berau sangat dipengaruhi oleh kinerja personil Sekretariat Daerah. Selain itu Sekretariat Daerah mempunyai ketugasan yang sangat penting dalam mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

F. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang menjadi perhatian pada tahun 2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrative bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaankesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaaan barang dan jasa.
6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi

birokrasi.

8. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam hal sarana dan prasarana Sekretariat Daerah memiliki aset sebagaimana berikut:

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

No	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai (Rp)	Jumah Item
1	Tanah		286.436.616.406,00	25
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor		
	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Rumah Dinas		
	Tanah Banguna Perumahan Lain – lain	Gudang		
	Tanah Kampung Lain-lain	TPU		
	Penggalian	Lahan Galian C		
	Tanah Banguna Pasar	Pasar		
	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Pendidikan		
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kesehatan		
	Tanah Lapangan Terbang Printis	Bandara		
	Tanah Lapangan Komersial	Bandara		
	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	Bandara		
	Tanah Untuk Bangunan Jalan Lain-lain	Pelabuhan		
	Tanah Kampung Lain-lain	TPU		
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Perumnas		

	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Asrama		
	Tanah Bangunan Industri Lainnya	Lahan Pabrik Biodisel		
	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Kesehatan		
	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	Tempat Ibadah		
	Tanah Bangunan Pelabuhan Udara	Bandara		
	Tanah Bangunan Olah Raga	Pendidikan		
	Tanah Banguna Puskesmas/Posyandu	Kesehatan		
	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	Keamanan		
	Tanah Jalan	Jalan		
	Tanah Jembatan	Jembatan		
	Tanah Bangunan Jln dan Jembatan Lain-lain	Turap		
2	Peralatan dan Mesin		Rp.53.277.556.184,-	31
3	Gedung dan Bangunan		Rp.38.770.168.430,-	52
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lain-lain	Gedung dan Arsip		
	Bangunan Gudang tertutup Permanen	Gudang Tertutup		
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Mushola		
	Gedung pos jaga Permanen	Pos Jaga		
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Garasi Kendaraan R2 dan R4		
	Rumah Negara Gol I Permanen	Rumah Dinas		
	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	Bangunan Mess Berau		
	Asrama Permanen	Asrama Pelajar		
	Tugu/Tanda Batas Admisntrasi Kecamatan	Batas Wilayah Kecamatan/Kampung		
	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	Bangunan Tempat Baliho		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp.440.905.000,-	5
	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Gardu Halaman Mesjid Agung		

	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel lain-lain	Battery dan Power System		
	Jalan Gang	Gang Pemancar		
	Jaringan Transmisi Lain-lain	Instalasi Listrik		
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	Penambahan Daya		
5	Aset Tetap Lainnya		Rp.384.348.700,-	6
	Buku Umum Lain – lain	Bahan bacaan dan Per-UU-an		
	Teknologi	Software		
	Pahatan Lain – lain	Bahan Fardhu Kifayah		
	Alat Musik / Band	Mixxer, Keybord Rumah Jabatan		
	Alat Olah Raga Lainnya (Lain - lain)	Lapangan Tenis Meja		
	Tanaman Holtikultura	Tanaman Hias		
6	Aset Tidak Berwujud			
7	Aset Lain-lain		Rp.1.192.480.791,51	10
	Jumlah			

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Berau ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Startegis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021- 2026 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Berau periode 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi antara lain:

Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau diatas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik”***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Nilai /Predikat AKIP Kab.Berau
 3. Survei Kepuasan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator sebagai berikut
 1. Status Kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
- 3) Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum
 1. Persentase permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan

- 4) Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (valur for money)

1. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- 5) Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD

1. Persentase realisasi pelaksanaan Kegiatan APBD

3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif.

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Proses perencanaan strategis merupakan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Berau.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik	Indeks Reformasi	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	CC (58)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (70)	BB (76)
			Nilai/Predikat AKIP	Nilai	99	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	B (72)
			Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	101	A (89,66)	A (90,12)	A(92,16)	A(94,06)	A(96,26)	A (98)
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/St atus	100	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	85,33	61 (CUKUP)	61 (CUKUP)	65 (CUKUP)	81(BAIK)	81(BAIK)	85(BAIK)
		Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase RealisasiPelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel II.2
Program / Kegiatan, Tujuan, Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Nilai/Predikat AKIP	Nilai			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai			
2		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/Status	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Adminstrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
3		Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
4		Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
5		Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Semua PD	Bagian Organisasi
		Nilai/Predikat AKIP	Hasil Evaluasi	Semua PD	
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dan Kemendagri	Semua PD	Bagian Tata Pemerintahan
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	-	-	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
4	Pengadaan Barang/Jas yang memberikan pemenuhan nilai manfa yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase RealisasiPelaksanaan Kegiatan APBD	-	Semua PD	Bagian Adm Pembangunan

C. PERJANJI KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A(92,16)
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (CUKUP)
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.85.341.943.928
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Rp.68.273.277.988
3	Program Perekonomian dan pembangunan	Rp.7.158.351.806

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Berau melaksanakan 3 (tiga) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 69 (enam puluh Sembilan) sub kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 128.015.131.887. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi RP. 162.744.311.822. Adapun realisasi Anggaran sebesar Rp. **135.235.789.883** (83,09%)

2. Target Belanja Sekretariat Daerah

Tabel II.5
Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO URUT	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)	162.744.311.822	135.235.789.883
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)	85.341.943.928	75.351.594.876
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.017.399.100	783.840.497
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	767.000.000	554.359.497
	2 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	250.399.100	229.481.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.611.877.312	26.001.866.377
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.255.996.512	24.840.694.777
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	978.824.200	805.763.200
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	377.056.600	355.408.400
	Admnistrasi Kpegawaaian Perangkat Daerah		1.092.510.000	613.363.607
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	189.430.000	161.988.000
	7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000	46.120.000
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	843.920.000	405.255.607
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		11.735.242.276	9.630.631.841
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.134.200	77.216.700
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.464.477.076	4.019.417.267
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	779.900.000	661.130.000
	12	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	244.876.000	201.680.000
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.031.855.000	1.418.307.367
	14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.100.000.000	3.252.880.507
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.132.360.000	3.991.379.130
	15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.581.640.000	2.471.640.000
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.550.720.000	1.519.739.130
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.377.718.000	10.615.349.342
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.498.000	11.281.800
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.715.050.000	7.235.600.710
	19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	141.920.000	115.025.000
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.508.250.000	3.253.441.832
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.499.590.000	2.926.142.070
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	739.040.000	401.334.740

	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.524.884.000	738.550.596
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.920.000	66.938.500
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.386.000	668.870.632
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.319.360.000	1.050.447.602
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.338.927.540	785.530.546
	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	621.263.540	168.610.546
	27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	117.664.000	16.920.000
	28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000	600.000.000
	Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah		4.324.754.200	2.964.829.264
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.018.534.600	746.054.560
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	799.909.600	628.591.100
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.506.310.000	1.590.183.604
	Penataan Organisasi		2.136.502.500	1.678.102.547
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	793.082.000	707.681.815
	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	639.320.500	380.033.305
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	704.100.000	590.387.427
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		16.075.063.000	15.360.559.655
	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.209.000.000	1.165.020.922
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14.181.863.000	13.580.889.539
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	684.200.000	614.649.194
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		68.273.277.988	51.702.335.974
	Administrasi Tata Pemerintahan		4.318.982.788	3.079.985.106
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.567.737.388	1.257.373.600
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.704.645.400	1.018.734.098
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.046.600.000	803.877.408
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		61.237.082.500	46.245.212.105

	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40.408.582.500	27.198.021.514
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9.739.000.000	8.402.605.056
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.089.500.000	10.644.585.535
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.229.159.700	2.035.669.489
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	779.845.000	685.451.567
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	658.077.000	610.774.495
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	791.237.700	739.443.427
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		488.053.000	341.469.274
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	372.634.000	232.445.137
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	115.419.000	109.024.137
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		7.158.351.806	6.251.353.898
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		930.600.000	715.453.383
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	461.000.000	289.893.137
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	319.600.000	301.163.898
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	150.000.000	124.396.348
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.328.102.000	2.228.169.820
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.093.379.000	1.050.410.663
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	635.883.000	593.279.000
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	598.840.000	584.480.157
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		3.899.649.806	3.307.730.695
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	879.329.200	726.027.974
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.932.106.606	1.557.395.036
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.088.214.000	1.024.307.685
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		0	0
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0	0

1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.970.738.100	1.930.505.135
	1	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.998.000	21.989.950
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.518.100	162.500.400
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.000.000	204.931.976
	5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.394.000	2.394.000
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.998.500	456.826.744
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.047.500	712.406.188
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	179.698.027
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	44.990.000
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.782.000	89.769.000
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	54.998.850
		JUMLAH	162.744.311.822	135.235.789.883

Sumber Data : DPPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel II.6
Anggaran Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	2.136.502.500	1.678.102.547	78,54

2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	1.046.600.000	803.877.408	76,81
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	658.077.000,00	610.774.495,00	92,81
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	879.329.200,00	726.027.974,00	82,57
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	635.883.000,00	593.279.000,00	93,30

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau memperoleh nilai sebesar **52,20 (Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh)** dengan kategori **CC**, yang menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau terdapat gambaran bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau “Cukup Memadai”, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30%	20,40	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,00	0,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	65,25	52,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	CC

2. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Berau Nomor 700/6/LHE-KLjIP/2023 tanggal 28 Pebruari 2024 perihal Hasil Evaluasi LKjIP Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Pada Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai 22,20 dari bobot 30,00 yang seharusnya di capai. Dari hasil tersebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran manajemen sebagai berikut :

- Belum ada dokumen Cascading dan Crossscuting
- Belum ada dokumen Evaluasi per triwulan atas rencana aksi yang telah di buat
- Belum di lampirkan dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III,IV dan Pelaksana

2) Pengukuran Kinerja

Pada Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai 18,00 dari bobot 30,00 yang seharusnya di capai. Dari hasil tersebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran manajemen sebagai berikut :

- Belum ada bukti pelaksanaan rapat internal evaluasi rencana aksi dan pencapaian kinerja per triwulan
- Tidak ada SOP pengumpulan data kinerja
- Belum ada bukti bahwa pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.

3) Pelaporan Kinerja

Pada Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai 12,00 dari bobot 15,00 yang seharusnya di capai. Dari hasil tersebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran manajemen sebagai berikut :

- Belum ada bukti rapat internal dalam pembahasan laporan kinerja dan bukti reuiu oleh tim penyusun sebelum di formalkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai 00,00 dari bobot 25,00 yang seharusnya di capai. Dari hasil tersebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran manajemen sebagai berikut :

- Belum ada penunjukkan tim dalam melakukan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja
- Belum ada laporan evaluasi mandiri atas Akuntabilitas Kinerja

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang perlu di tindaklanjuti dalam rangka perbaikan,sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

- Menyusun Dokumen Cascading dan Crosscutting kemudian di formalkan
- Melaksanakan evaluasi per triwulan atas rencana aksi yang telah di buat dan di tuangkan ke dalam dokumen laporan evaluasi rencana aksi.
- Untuk penilaian selanjutnya agar melampirkan dokumen perjanjian kinerja Eselon III,IV dan Pelaksana.

B.PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)	Indeks RB disampaikan per Tahun oleh Kementrian PAN dan RB		B (65)	73,61	113
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)	Nilai AKIP disampaikan per Tahun oleh Kementrian PAN dan RB		B (68)	B (62,74)	92%
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (94,06)	Pembahasan penyampaian Laporan SKM ke biro organisasi Provinsi Kaltim dan kementerian rb pertahun		A (94,06)	A (85)	90%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/ Status	Tinggi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD disampaikan per Tahun oleh Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mendagri		Tinggi	Sedang*	Angka sementara menggunakan realisasi Tahun 2024 hasil penilaian belum keluar
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%	Sasaran Strategis ini tidak memiliki target per triwulan		100	91,67	91,67
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (CUKUP)	Sasaran Strategis ini tidak memiliki target per triwulan		81 (Baik)	76,14 (Baik)	94
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100%	Triwulan I	100%	100%	16,67%	16,67
					Triwulan II	50,00%	100%	50,00%	50
					Triwulan III	75,00%	100%	75,00%	75
					Triwulan IV	100%	100%	100 %	100

C. ANALIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan atau suatu sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dan juga sebagai perbaikan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara lain yaitu :

4. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
5. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
6. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
7. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai , keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65 (B)	73,61 (B)	113
		Kategori Nilai/Predikat AKIP	Nilai	68 (B)	62,74 (C)	92
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	94,06 (A)	85 (A)	90
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat LPPD tingkat Provinsi (kategori Kabupaten)	Predikat / Status	Tinggi	Sedang*	93,74
3	Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum	Presentase Permasalahn Hukum yang di tangani dan di selesaikan	Persen	100	91,67	91,67
4	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang da jasa	Persen	85 (Baik)	90 (Baik)	106%

5	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Persen	100	100	100
---	---	--	--------	-----	-----	-----

SASARAN I

MENINGKATNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFESIEN DAN MELAYANI

Tabel III.4

Sasaran I Meningkatkan Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (65)	73,61	113
		Nilai Sakip Kabupaten Berau	Nilai	B (68)	C (62,74)	92
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (94,06)	85	90

1. Indikator Kinerja Indeks Reformasi

Birokrasi Realisasi Indikator Kinerja

Tabel III.5

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	B (65)	73,61	

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kineja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	C (43.06)	BB (73,61)	

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76)	73,61	

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket. (+/-)
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	C (43,06)	73,61	-

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Kategori Reformasi Birokrasi Tahun

2024 antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam menetapkan rencana aksi.
2. Tingkat responsif perangkat daerah sangat baik dalam pengisian realisasi rencana aksi per triwulan.

2. Indikator Kinerja Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Berau

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban setiap daerah untuk

dapat mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah digunakan. Sasaran kualitas akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju good governance.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada asas keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan partisipasinya masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :

Tabel III.6

**Indikator Kategori Nilai/Predikat AKIP
Kriteria Penilaian**

No	Komponen		Sub Komponen		Total Bobot
		Sub-Komponen 1: Keberadaan 20 %	Sub-Komponen 2 : Kualitas 30 %	Sub-Komponen 3 : Kualitas 50 %	
1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

RINCIAN HASIL EVALUASI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22.54
2	Pengukuran Kinerja	30	18,02
3	Pelaporan Kinerja	15	10,20

4	Evaluasi Internal	25	11,99
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	B (68)	B (62,74)	92%

Hasil evaluasi tahun 2024 “ **jika diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 0,34 poin. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pengontrolan dan pengawasan mengenai capaian kinerja program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan SAKIP.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Kategori Nilai/ Predikat

AKIP Tahun 2024 antara lain :

1. Seluruh Perangkat Daerah telah membuat LKj-IP dan PK sesuai waktu yang sudah ditentukan
2. Seluruh Perangkat Daerah telah memenuhi Dokumen SAKIP pada esr.menpan.go.id
3. Pemerintah Kabupaten Berau memiliki aplikasi ESAKIP sebagai media perencanaan terintegrasi

Permasalahan :

1. Masih ada beberapa Indikator Kinerja Tingkat Perangkat Daerah belum memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant and Time Bound)
2. Belum memiliki Pohon Kinerja tingkat perangkat daerah dan beberapa perangkat daerah belum memiliki pohon kinerja serta belum teridentifikasi Critical Succes (CSF) atau faktor kunci keberhasilan
3. Perjanjian Kinerja belum dibuat dengan mempertimbangkan relaisasi kinerja tahun sebelumnya
4. Aplikasi ESAKIP-Berau belum termanfaatkan dengan baik
5. Laporan Kinerja tingkat perangkat daerah masih belum menyampaikan informasi yang memadai
6. Evaluasi Internal belum dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah
7. Masih ada Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti hasil Evaluasi Internal.

Solusi

1. Melakukan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan agar indikator kinerja memenuhi kriteria SMART
2. Menyusun Pohon Kinerja tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
3. Memanfaatkan aplikasi ESAKIP-Berau dengan secara optimal sebagai pengukuran kinerja organisasi
4. Memastikan seluruh Perangkat Daerah dengan membuat LKj-IP
5. Melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah bukan melakukan evaluasi LKj-IP
6. Memastikan rekomendasi evaluasi internal telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah

3. Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Berau

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan

tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara periodik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel III.7

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (94,06)	85	90%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkatan/ Penurunan
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,16	85	-7,16

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (98)	85	A (98)

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket. (+/-)
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,16	85	

Dari tabel diatas dapat dilihat kategori survei kepuasan masyarakat Kabupaten Berau untuk tahun 2024 masih belum keluar hasil survei kepuasan masyarakat, hal ini masih tahapan proses perekapan laporan oleh perangkat daerah terkait laporan SKM. Sedangkan untuk tahun 2022 kategori A yaitu dengan nilai mencapai 84,56 jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi 90,31 dengan kategori A. Jika dilihat dari capaian kinerja terkait indikator survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Berau menunjukkan hal yang positif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik, yang mana masuk dalam kategori A.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai abdi masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- ❖ Perlu diketahui peraturan-peraturan yang mendasari tentang pelaksanaan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :
 1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat
- ❖ Selain itu ada perbedaan unsur pelayanan yang dimuat dalam setiap peraturan sehingga terjadi perubahan pengukuran nilai rata-rata dan ini sangat berpengaruh terhadap laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan Peraturan Kementerian PAN & RB terkait pedoman SKM

KEP/25/M.PAN/2/2004	PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014	PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
1. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan	1. Persyaratan
2. Persyaratan pelayanan	2. Prosedur	2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Kejelasanpetugas pelayanan	3. Waktu Pelayanan	3. Waktu Penyelesaian
4. Kedisiplinan petugas pelayanan	4. Biaya/Tarif	4. Biaya/Tarif
5. Tanggung jawab petugas pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan	6. Kompetensi Pelaksana	6. Kompetensi Pelaksana
7. Kecepatan pelayanan	7. Perilaku Pelaksana	7. Prilaku Pelaksana

8. Keadilan m endapatkan pelayanan	8. Maklumat Pelayanan	8. Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan
9. Kesopanan dan keramahan petugas	9. Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	9. Saran dan Prasarana
10.Kewajaran biaya pelayanan		
11.Kepastian biaya pelayanan		
12.Kepastian jadwal pelayanan		
13.Kenyamanan lingkungan		
14.Keamanan pelayanan		

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANA N	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan disetiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat memuat dengan memuat 14 unsur pelayanan tetapi belum mengacu pada :
 - UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan.
 - Ruang lingkup SKM belum selaras dengan Komponen Standar Pelayanan
 - Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 81,26 – 100.00
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat dengan memuat 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan tetapi dalam Peraturan ini belum :
 - Mengatur teknis operasional pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
 - Metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan sehingga tidak ada keseragaman hasil survei
 - Penentuan jumlah sample responden belum diatur
 - Hasil survei belum dipublikasikan
 - Skor kepuasan masyarakat dalam kuantitatif dapat dikonversikan dalam bentuk kualitatif (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Buruk)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 Unsur Pelayanan. Dalam Peraturan ini telah diatur antara lain :
 - Unsur Pelayanan ada memuat Saran dan Prasarana
 - Penetapan responden menggunakan sample Morgan dan Krejcie
 - Analisa Tindak Lanjut Hasil Survei dan rencana tindak lanjut
 - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus di Publikasi

- Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 88,31 – 100.00 karena dibanding dengan interval peraturan sebelumnya hanya mencapai 81,26 – 100.00.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Survei Kepuasan Masyarakat

Tahun 2024 antara lain :

1. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan Survei
2. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum memahami pentingnya melaksanakan Survei
3. Masih ada Perangkat Daerah yang belum memahami teknis tata cara penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Solusi :

Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala seluruh Perangkat Daerah terkait tata cara dalam melakukan survei dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat serta penyusunan laporan hasil tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

=====

SASARAN II
INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARA KINERJA
DAERAH

=====

Tabel III.8

Sasaran II Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	Predikat /Status	Tinggi	Sedang *	93,74

1. Indikator Kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Ralisasi	% Capaian
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi	Sedang*	93,74

*Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada capaian Tahun 2023, untuk 2024 Hasil Penilaian Belum Keluar (menunggu SK Mendagri)*

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkatan/ Penurunan
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/ Status	Sedang (3,1964)	Sedang*	-

*Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada capaian Tahun 2023, untuk 2024 Hasil Penilaian Belum Keluar (menunggu SK Mendagri)*

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun) 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi	Sedang*	

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket (+/-)
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Sedang	Sedang*	

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehingga angka yang digunakan dalam pengukuran kinerja masih menggunakan angka sementara berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Capaian tahun 2023.

Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menunjukkan capaian Sedang dengan skor 3,1964. Hasil evaluasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capaian Tahun 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu

Status Kinerja **Tinggi** (Skor 3,41). Namun capaian di Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau adalah **Rendah** (Skor 2,81)

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Status Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau Tahun 2024 antara lain :

1. Perubahan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Perencanaan dan penganggaran belum memperlihatkan IKK urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan data IKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
4. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pelaksanaan IKK urusan Pemerintahan Daerah
5. Belum optimalnya capaian hasil dan keluaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena belum terangkakan secara baik dan optimal.

Solusi :

1. Melaksanakan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur
2. Mengintegrasikan IKK dalam DOKRENDA
3. Penguatan peran TIM dan perkuat Koordinasi dalam pelaksanaan Urusan

SASARAN III

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA BANTUAN PENYELESAIAN HUKUM

Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyatakan “*penanganan perkara Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum*”. Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau juga diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditujukan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang terdiri dari ASN, Non-ASN dan CPNS dalam hal terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata, TUN dan Pidana (hanya untuk pendampingan pada tingkat penyidikan). Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, diberikan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan baik yang menyangkut permasalahan hukum antara Pemerintah dengan Masyarakat atau Masyarakat dan Perusahaan/Badan Hukum Perdata atau Publik lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau guna untuk memudahkan dalam penanganan permasalahan hukum dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun jumlah penanganan permasalahan hukum baik litigasi dan non-litigasi pada Tahun 2024 adalah sebanyak 11 Permasalahan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Tabel III.9

Sasaran III Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang di tangani dan di selesaikan	Persen	100	91,67%	91,67%

2. Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	91,67%	91,67%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkatan/ Penurunan
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	130	91,67	-38,33%

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	91,67	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket. (+/-)
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	130%	91,67	-38,33%

Catatan:

Realisasi ini hanya berdasarkan realisasi pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau, untuk realisasi secara nasional Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki data tersebut

Dari Tabel diatas dapat dilihat Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di LingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyatakan *“penanganan perkara Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum”*. Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau juga diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditujukan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang terdiri dari ASN, Non-ASN dan CPNS dalam hal terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata, TUN dan Pidana (hanya untuk pendampingan pada tingkat penyidikan). Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, diberikan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan baik yang menyangkut permasalahan hukum antara Pemerintah dengan Masyarakat atau Masyarakat dan Perusahaan/Badan Hukum Perdata atau Publik lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau guna untuk memudahkan dalam penanganan permasalahan hukum dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Hasil evaluasi tahun 2024 **terdapat peningkatan dalam capaian target** dikarenakan jumlah kasus yang masuk sepanjang tahun 2024 meningkat, ini sudah termasuk dalam penanganan perkara lanjutan dari tahun sebelumnya.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan Tahun 2024 antara lain :

1. Karena jumlah penanganan perkara litigasi (perdata dan tata usaha negara) yang di tangani berkurang dari jumlah perkara tahun sebelumnya.

Solusi :

1. Melaksanakan penataan terhadap berkas/dokumen administrasi yang berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat agar pada saat timbul permasalahan dapat dengan mudah di gunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

2. Melakukan upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) terhadap permasalahan yang terjadi, dalam hal penyelesaian secara non litigasi tidak tercapai maka penanganan permasalahan hukum secara litigasi (di pengadilan)

=====

SASARAN IV

**INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA PENGADAAN BARANG /JASA
YANG MEMEBERIKAN PEMENUHAN NILAI MANFAAT YANG SEBESAR-
BESARNYA (VALUE FOR MONEY)**

=====

Tabel III.10

**Sasaran IV Meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for
money)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Persentase peningkatan proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang di tetapkan	Persen	85 (Baik)	90 (Baik)	106 %

4. Indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang

dan Jasa Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	81 (Baik)	76,14 (Baik)	94 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Peningkan/Penurunan
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	71,91 (Baik)	76,14 (Baik)	5,2 %

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	81 (Baik)	76,14 (Baik)	94 %

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket (+/-)
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	71,91 (Baik)	76,14 (Baik)	+

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

- Indeks tata kelola pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Berau terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional meliputi system pengadaan , segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan yang diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP(Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering(Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering& Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).

3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ).

Penilaian Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) dilakukan oleh LKPP.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal untuk pengukuran tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) indikator dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan:	
	SiRUP	10%
	E-Tendering	20%
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30%
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40%

Predikat nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Predikat
1	100	Istimewa
2	>90 s.d <100	Sangat Baik
3	>70 s.d 90	Baik
4	≥50 s.d 70	Cukup
5	<50	Kurang

Hasil Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan(ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada website :

[https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelolapengadaan\(itkp\)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah\(klpemda\)tahun2023](https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelolapengadaan(itkp)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah(klpemda)tahun2023)

No.	Nama K/L/P D						Nilai per Indikator			Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat	Ket
		(1) SiRUP	(2) E-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non eTendering/ Non ePurchasing	e-Contrak	(3) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	(4) Tingkat Kematangan UKPB			
458	Kab. Berau	9,63	5,00	0	0	3,52	3,37	10,39	40	71,91	Baik	

Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2023

- SIRUP	: 9,63
- E-Tendering	: 5,00
- E-Purchasing	0
- Non E- Tendering/Non E-Purchasing	: 3,52
- E – Kontral	: 4,2
- Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	: 10,39
- Tingkat Kematangan UKPBJ	40
Total Nilai Pembobotan	: 71,91
Predikat	: Baik

Penyebab Peningkatan/Penurunan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 antara lain :

1. Penurunan penilaian pada Aspek Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Indikator e Tendering/Non e Purchasing dan e-Contrak karena pencapaian indikator dibawah 50 %, sehingga tidak d berikan penilaian.
2. Peningkatan pada Aspek Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) pada tahun 2023 nilai sebesar 10,39 meningkat menjadi 15. Peningkatan ini seiring dengan bertambahnya jumlah Personil JF PPBJ di tahun 2024 melalui Uji Kompetensi/Perpindahan jabatan lainnya.

SASARAN V

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA REALISASI APBD

Tabel III.11
Sasaran V Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100	100%	100%

- Indikator Kategori Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

APBD

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100	100 %	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	%
			2023	2024	Peningkatan /Penurunan
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	88,05	100%	Meningkat

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Indeks	100	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Ket.
			2023	2024	(+/-)
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	88,05	100%	+

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator presentase realisasi pelaksanaan Kegiatan APBD target 100 dan realisasi **100 %**.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Nilai Indeks Realisasi APBD 2024 antara lain :

1. Melakukan evaluasi kegiatan terhadap pencapaian progress kemajuan realisasi fisik dan keuangan
2. Dilaksanakannya monitoring evaluasi pelaporan setiap bulan ke OPD dan 13 Kecamatan
3. Mengintegrasikan seluruh system pelaporan yang berhubungan dengan monitoring evaluasi fisik dan keuangan yang bersumber dari biaya langsung APBD Kabupaten, Bank dan DAK APBN
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Administrasi Pembangunan

=====

Analisis Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah

=====

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari ke 5 (lima) sasaran menunjukkan pencapaian yang berbeda ada yang mencapai target dan yang tidak mencapai target sebagaimana dapat terlihat pada tabel diatas.

Meningkatnya 5 indikator menunjukkan pencapaian 90 % sampai 113 %. Sebagai contoh untuk Nilai Indeks RB Kabupaten Berau capaian kinerja 113, hasil evaluasi LKjIP Kab. Berau capaian kinerja sebesar 92, nilai survei kepuasan masyarakat dengan capaian 90, untuk Status/Predikat LPPD capaian kinerja 93,74%, untuk Presentase Permasalahan Hukum capaian kinerja sebesar 91,67 %, Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa capaian kinerja mencapai target sebesar 94 % dan Presentase Pelaksanaan Kegiatan APBD dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian indikator sasaran dan efisiensi penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.12

Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	113	83,85	29,15
		Nilai/Predikat AKIP	92	83,85	8,15
		Survei Kepuasan Masyarakat	90	59,44	30,56
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab. Berau	93,74	76,81	23,19
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	91,67	92,81	-1,14
4	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	94	82,57	11,43
5	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100	97,60	2,4

E. Realisasi Anggaran

Tabel III.13
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO URUT	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2		3	4	5
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)		162.744.311.822	135.235.789.883	83,09
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)		85.341.943.928	75.351.594.876	88,29
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.017.399.100	783.840.497	77,04
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	767.000.000	554.359.497	72,28
	2	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	250.399.100	229.481.000	91,65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.611.877.312	26.001.866.377	94,17
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.255.996.512	24.840.694.777	94,61
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	978.824.200	805.763.200	82,32
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	377.056.600	355.408.400	94,26
	Admnistrasi Kpegawayaan Perangkat Daerah		1.092.510.000	613.363.607	56,14
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	189.430.000	161.988.000	85,51
	7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000	46.120.000	77,96
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	843.920.000	405.255.607	48,02
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		11.735.242.276	9.630.631.841	82,07
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.134.200	77.216.700	67,65
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.464.477.076	4.019.417.267	90,03
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	779.900.000	661.130.000	84,77
	12	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	244.876.000	201.680.000	82,36
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.031.855.000	1.418.307.367	69,80
	14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.100.000.000	3.252.880.507	79,34

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.132.360.000	3.991.379.130	96,59
	15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.581.640.000	2.471.640.000	95,74
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.550.720.000	1.519.739.130	98,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.377.718.000	10.615.349.342	93,30
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.498.000	11.281.800	90,27
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.715.050.000	7.235.600.710	93,79
	19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	141.920.000	115.025.000	81,05
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.508.250.000	3.253.441.832	92,74
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.499.590.000	2.926.142.070	65,03
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	739.040.000	401.334.740	54,30
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.524.884.000	738.550.596	48,43
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.920.000	66.938.500	57,25
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.386.000	668.870.632	83,67
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.319.360.000	1.050.447.602	79,62
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.338.927.540	785.530.546	58,67
	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	621.263.540	168.610.546	27,14
	27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	117.664.000	16.920.000	14,38
	28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000	600.000.000	100,00
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		4.324.754.200	2.964.829.264	68,55
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.018.534.600	746.054.560	73,25
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	799.909.600	628.591.100	78,58
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.506.310.000	1.590.183.604	63,45
	Penataan Organisasi		2.136.502.500	1.678.102.547	78,54
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	793.082.000	707.681.815	89,23

	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	639.320.500	380.033.305	59,44
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	704.100.000	590.387.427	83,85
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		16.075.063.000	15.360.559.655	95,56
	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.209.000.000	1.165.020.922	96,36
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14.181.863.000	13.580.889.539	95,76
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	684.200.000	614.649.194	89,83
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		68.273.277.988	51.702.335.974	75,73
	Administrasi Tata Pemerintahan		4.318.982.788	3.079.985.106	71,31
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.567.737.388	1.257.373.600	80,20
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.704.645.400	1.018.734.098	59,76
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.046.600.000	803.877.408	76,81
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		61.237.082.500	46.245.212.105	75,52
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40.408.582.500	27.198.021.514	67,31
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9.739.000.000	8.402.605.056	86,28
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.089.500.000	10.644.585.535	95,99
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.229.159.700	2.035.669.489	91,32
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	779.845.000	685.451.567	87,90
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	658.077.000	610.774.495	92,81
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	791.237.700	739.443.427	93,45
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		488.053.000	341.469.274	69,97
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	372.634.000	232.445.137	62,38
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	115.419.000	109.024.137	94,46
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		7.158.351.806	6.251.353.898	87,33
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		930.600.000	715.453.383	76,88
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	461.000.000	289.893.137	62,88
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	319.600.000	301.163.898	94,23
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	150.000.000	124.396.348	82,93
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				95,71

			2.328.102.000	2.228.169.820	
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.093.379.000	1.050.410.663	96,07
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	635.883.000	593.279.000	93,30
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	598.840.000	584.480.157	97,60
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		3.899.649.806	3.307.730.695	84,82
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	879.329.200	726.027.974	82,57
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.932.106.606	1.557.395.036	80,61
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.088.214.000	1.024.307.685	94,13
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		0	0	0
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0	0	0
1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.970.738.100	1.930.505.135	97,96
	1	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.998.000	21.989.950	99,96
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.518.100	162.500.400	99,99
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.000.000	204.931.976	98,05
	5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.394.000	2.394.000	100,00
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.998.500	456.826.744	96,17
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.047.500	712.406.188	97,58
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	179.698.027	99,83
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	44.990.000	99,98
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.782.000	89.769.000	99,99

	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	54.998.850	100,00
		JUMLAH	162.744.311.822	135.235.789.883	83,10

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah, maka laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersebar pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau secara rinci realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel III.14

Alokasi Anggaran Belanja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)		%
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	B (73,61)	113	Rp. 704.100.000,-	Rp. 590.387.427,-	83,85
2	Nilai/Predikat AKIP	B (68)	C (62,74)	92	Rp. 704.100.000,-	Rp. 590.387.427,-	83,85
3	Survei Kepuasan Masyarakat	A (94,06)	A (85)	90	Rp. 639.320.500,-	Rp. 380.033.305,-	59,44
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Tinggi (3,41)	Sedang *	93,74	Rp.1.046.600.000,-	Rp.803.877.408,-	76,81
5	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	100	91,67	91,67	Rp. 658.077.000,-	Rp. 610.774.495,-	92,81
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	85 (C)	90 (B)	106	Rp. 598.840.000,-	Rp. 584.480.157,-	84,82

7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	100	100	100	Rp. 598.840.000,-	Rp. 584.480.157,-	97,60
---	--	-----	-----	-----	-------------------	-------------------	-------

Sumber : DPA Perubahan Sekretariat Daerah, 2024

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dalam tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian sesuai dengan rencananya. Dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 14.912.396.794,00** terealisasi **Rp 12.329.657.657,00** atau **82,68 %** dengan rata-rata capaian sasaran sebesar **90 %**, Hasil analisis pelaksanaan realisasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dalam tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel III.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Anggaran Realisasi (Rp)	%
Sasaran I : Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien dan melayani				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Penataan Organisasi	2.136.502.500,00	1,678.102.547,00	78,54
Sasaran II : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah				
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Administrasi Tata Pemerintahan	4.318.982.788,00	3.079.985.106,00	71,31
Sasaran III : Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.229.159.700,00	2.035.669.489,00	91,32
Sasaran IV : Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)				

3	Program Perekonomian dan Pembangunan			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.899.649.806,00	3.307.730.695,00	84,82
Sasaran V : Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.328.102.000,00	2.228.169.820,00	95.71
Jumlah		14.912.396.794,00	12.329.657.657,00	82,68

Sumber : DPA Perubahan Sekretariat Daerah, 2024

Bab IV Penutup

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu dalam pengumpulan data kepada bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tidak tepat waktu dalam menyampaikan data dan informasi pendukung baik data kinerja dan keuangan, sehingga menghambat penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau. Dimana pengumpulan Laporan Kinerja ini mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian PAN dan RB.

Namun berkat kerja keras serta ketekunan TIM dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja ini dapat disusun hingga selesai.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

- **RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- **PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**
- **PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHU 2024**
- **RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**



RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan APT. Pranoto No. 1 Telp. (0554) 21008,21076,21015 Fax. 21068
Tanjung Redeb - Berau

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (65)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (68)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (94,06)
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi
3.	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persentase	100%
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	81 (BAIK)
5.	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persentase	100%

Tanjung Redeb, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



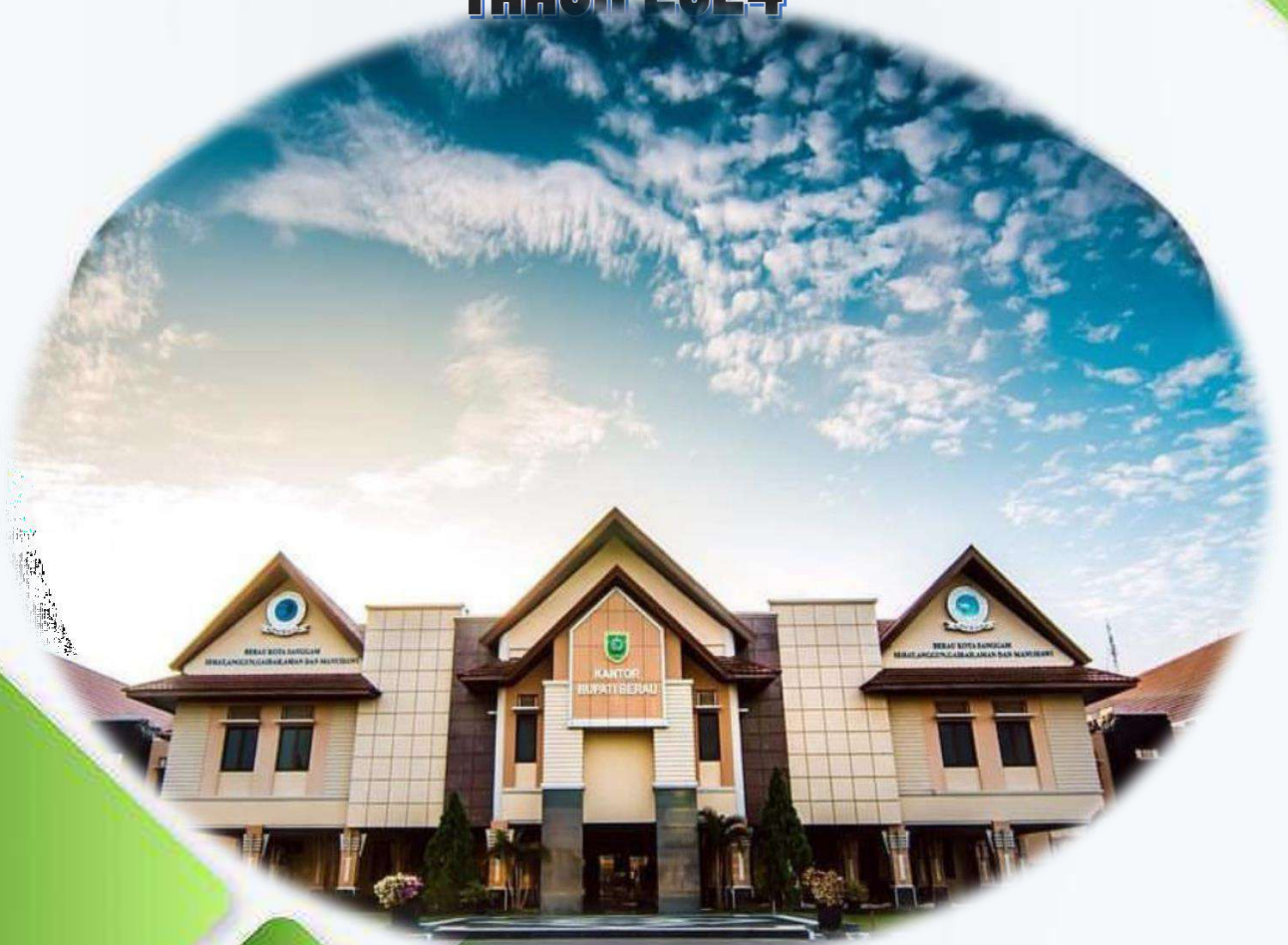
MUHAMMAD SAID, SH, MH

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19790723 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan APT. Pranoto No. 1 Telp. (0554) 21008,21076,21015 Fax. 21068
Tanjung Redeb - Berau

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID, SH, MH
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd
Jabatan : BUPATI BERAU
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI BERAU


Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH


MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19790723 200212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (65)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (68)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (94,06)
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi
3.	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100 %
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	81 (BAIK)
5.	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100 %


 BUPATI BERAU

H. SRI JUNIARSHI MAS, M.Pd


 SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD SAID, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790723 200212 1 001

**PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 72.781.843.483,-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 49.817.512.800,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 4.965.605.604,-



 BUPATI BERAU



H. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



 SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SAID, SH, MH

 Pembina Tingkat I

 NIP. 19790723 200212 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan APT. Pranoto No. 1 Telp. (0554) 21008,21076,21015 Fax. 21068
Tanjung Redeb - Berau

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

- Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
- Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif Terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- Fungsi : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada Organisasi Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	PenanggungJawab
1.	Meningkatnya birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi dan Inspektorat
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Semua PD	Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappelitbang
		Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi

2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kab.Berau	Status	Hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dan Kemendagri	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Tapem
3.	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	-	-	Sekretariat Daerah/Bagian Hukum dan Perundang-undangan
4.	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	-	-	Sekretariat Daerah/Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Persen	-	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Pembangunan

Tanjung Redeb, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH


MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pempina Tingkat I
NIP. 19790723 200212 1 001

DISUSUN OLEH

*BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU*